

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penerapan SPBE di Kota Batam telah menunjukkan sejumlah kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan pada aspek-aspek penting pada penerapannya.

1. Komunikasi, Pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Batam menunjukkan kemajuan melalui berbagai bentuk komunikasi seperti surat resmi, sosialisasi daring, dan grup WhatsApp internal. Namun, masih terdapat kendala pada aspek komunikasi karena belum adanya SOP khusus, serta penyampaian informasi yang belum sepenuhnya konsisten dan terstruktur.
2. Sumber Daya, implementasi SPBE di Kota Batam masih menghadapi kendala pada ketersediaan SDM, anggaran, dan infrastruktur, terutama tenaga IT yang terbatas, kebutuhan anggaran yang besar, serta tantangan geografis yang mempengaruhi kestabilan layanan.
3. Sikap/Disposisi, Disposisi, pelaksana SPBE di Kota Batam menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi terhadap kebijakan, namun proses adaptasi tetap dilakukan secara bertahap melalui uji coba dan pelatihan, serta disertai kehati-hatian dalam peluncuran sistem guna menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Struktur Organisasi/Birokrasi , Pengelolaan SPBE di Kota Batam didukung oleh struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, kepatuhan terhadap SOP, serta koordinasi lintas OPD yang efektif melalui Tim Koordinasi SPBE.

Berdasarkan analisis terhadap keempat indikator dalam implementasi kebijakan SPBE di Kota Batam, ditemukan faktor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Faktor-faktor tersebut mencakup ketidakcukupan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia dengan keahlian khusus, keterbatasan jangkauan jaringan internet, serta sosialisasi yang masih belum maksimal.

5.2 Saran

Untuk Pemerintah Kota Batam, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi yang lebih masif dan terarah terkait layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar masyarakat lebih memahami manfaat dan cara penggunaannya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan pihak swasta dalam pemenuhan infrastruktur dan pelatihan teknologi, guna untuk keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Pemerintah perlu melakukan pemerataan jaringan internet terutama di wilayah kepulauan dan rawan gangguan teknis, agar implementasi SPBE dapat berjalan secara merata. Untuk masyarakat, diharapkan dapat mendukung program SPBE dengan aktif memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai *prinsip good governance*.